



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ENVIRONMENTAL
ESP
SERVICES PROGRAM

HASIL DISKUSI RENCANA REHABILITASI LAHAN DI KAWASAN TNGP

CIANJUR – JAWA BARAT



JULI 2005

This publication was produced by Development Alternatives, Inc. for the United States Agency for International Development under Contract No. 497-M-00-05-00005-00

Kredit foto: ESP Jakarta

Lahan kegiatan pertanian di Taman Nasional Gede Pangrango.

HASIL DISKUSI RENCANA REHABILITASI LAHAN DI KAWASAN TNGP

CIANJUR – JAWA BARAT

Title:	Hasil Diskusi Rencana Rehabilitasi Lahan di Kawasan TNGP Cianjur – Jawa Barat.
Program, activity, or project number:	Environmental Services Program, DAI Project Number: 5300201.
Strategic objective number:	SO No. 2, Higher Quality Basic Human Services Utilized (BHS).
Sponsoring USAID office and contract number:	USAID/Indonesia, 497-M-00-05-00005-00.
Contractor name:	DAI.
Date of publication:	July 2006

DAFTAR ISI

I.	RESUME HASIL DISKUSI PARA PIHAK	I
1.1.	WAKTU DAN TEMPAT.....	2
1.2.	PESERTA	2
1.3.	AGENDA KEGIATAN.....	2
1.4.	REKOMENDASI.....	2
2.	RENCANA PROGRAM REHABILITASI PARTISIPATIF	3
2.1.	WAKTU.....	3
2.2.	TEMPAT	3
2.3.	AGENDA KEGIATAN.....	3
2.4.	PESERTA DISKUSI	3
2.5.	HASIL DISKUSI	4
2.5.1.	<i>Identifikasi CF di kabupaten Cianjur</i>	4
2.5.2.	<i>Tanya jawab</i>	4
2.5.3.	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>	4
3.	RENCANA PROGRAM REHABILITASI PARTISIPATIF II	5
3.1.	WAKTU.....	5
3.2.	TEMPAT	5
3.3.	AGENDA DISKUSI	5
3.4.	PESERTA DISKUSI	5
3.5.	HASIL DISKUSI	6
3.5.1.	<i>Review</i>	6
3.5.2.	<i>Persepsi Rehabilitasi Partisipatif.....</i>	6
3.5.3.	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>	7

I. RESUME HASIL DISKUSI PARA PIHAK

ESP sebagai program yang berupaya melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan yang ada dikawasan hulu dan hilir dengan tidak melupakan kondisi ekonomi masyarakat. Namun dalam implementasinya kita selalu dihadapkan dengan kondisi yang kontra produktif. Untuk mencapai maksud diatas perlu dilakukan pertemuan intensif dan terfokus dengan pihak terkait (TNGP, PKT, Perhutani dll) dengan rencana konservasi dan perbaikan lingkungan lainnya sehingga ditemukan formulasi yang tepat untuk kondisi tempatan

Sampai saat ini sudah dilakukan dua kali diskusi dengan pihak-pihak tersebut. Dari dua agenda diskusi (26 Oktober – 15 Nopember 2005) yang dihadiri oleh Dinas PKT, Perhutani KPH Cianjur dan Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP) selaku pemegang otoritas pengelolaan (POP) kehutanan dan lahan, dan beberapa lembaga pendukung seperti LSM dan Dinas Pertanian, PSDAP, PDAM, terungkap beberapa persepsi tentang Community Forestry (CF).

Hal mendasar dalam implementasi CF adalah mempertegas peran (partisifasi) masyarakat dalam managemant pengelolaan hutan, diharapkan dengan meningkatnya partisifasi tersebut bentuk interaksi masyarakat dengan hutan semakin harmonis yang pada gilirannya dari hasil hutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa suka tani tepat berada di kaki gunung gede-pangrango yang sebelumnya dikelola oleh PERUM perhutani, dengan Permen Kehutanan No. 174/2004 areal tersebut diserahkan kelolakan kepada Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP).

Interaksi masyarakat terhadap kawasan sudah terjadi sejak lama (illegal), melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dibangun nota kesepakatan dalam pemanfaatan lahan antara perhutani dengan masyarakat yang berlaku dua tahun, dan berakhir tahun 2004.

Dengan beralihnya pengelolaan dari Perhutani kepada TNGP, yang memiliki mekanisme dan kebijakan yang berbeda dalam pemanfaatan dan perlakuan terhadap kawasan menjadi persoalan yang tersendiri.

Dengan status sebagai kawasan taman nasional bentuk perlakuan sebagai suaka perlindungan dan penyelamatan keaneka ragaman hayati secara alamiah, sedapat mungkin menghindari dari intervensi manusia.

Dari dua kondisi tersebut perlu ditemukan solusi alternatif yang dapat mengakomodir kepentingan tersebut, untuk itu perlu diambil langkah-langkah taktis yang adaptif dengan kondisi diatas. Dimana keterlibatan masyarakat dengan pendekatan ekonominya dapat sinergis dengan kepentingan ekologis.

Peran strategis masyarakat tersebut ditempatkan dalam kemitraan yang setara dengan unsur lain yang terlibat dalam pengelolaan kawasan dengan menganut prinsip keadilan, lestari, dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan sektor lainnya.

Inisiatif awal yang disepakati adalah pembentukan team kajian yang dikoordinir oleh TNGP, team ini akan melakukan inventarisasi dan kajian lapangan diwilayah yang direncanakan (50 Ha di blok gunung putri). Site ini merupakan salah satu pintu masuk kekawasan TNGP dan secara faktual kondisi lahan tersebut dijadikan areal pertanian oleh masyarakat dengan demikian model yang akan dikembangkan menjadi model bagi wilayah / blok lain yang ada diwilayah Taman Nasional Gede Pangrango, serta dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan ditingkat daerah (PERDA).

I.1. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan diskusi dilaksanakan dua kali putaran

1. 26 Oktober 2005, tempat di Kantor ESP-Cianjur
2. 15 Nopember 2005, tempat di Wisma AGROPOLITAN

I.2. PESERTA

Peserta pertemuan merupakan representasi dari lembaga lembaga yang mempunyai pengalaman dalam bidang Community Forestry langsung seperti : Dinas PKT, Perhutani KPH-Cianjur dan TNGP dan beberapa LSM lingkungan. Peserta dari lembaga pendukung antara lain: Dinas Pertanian, PSDAP

I.3. AGENDA KEGIATAN

Alur kegiatan secara garis besar terbagi pada tiga tahapan antara lain :

1. Sering pengalaman tentang Community Forestry
2. Diskusi dan Tanya jawab
3. Mencari model alternatif pengelolaan hutan di Kabupaten Cianjur

I.4. REKOMENDASI

Perlu dilakukan kajian lapangan terkait dengan potensi (sumberdaya) dan masalah sebelum pelaksanaan kegiatan

1. Memperjelas bentuk, peran dan mekanisme kemitraan dari masing-masing pihak
2. Harus ada keseimbangan antara kegiatan ekologis dengan ekonomis
3. Perlu dibangun kelembagaan lokal dalam pengelolaan hutan dan lahan disetiap wilayah kelola
4. Perlu dibangun kesepakatan dalam pembagian hasil secara proporsional diantara komponen yang terlibat.
5. Perlu dibuat kebijakan yang dapat dijadikan Rujukan/dasar dalam pelaksanaan pengelolaan kahutanan.

2. RENCANA PROGRAM REHABILITASI PARTISIPATIF

2.1. WAKTU

26-10-2005

2.2. TEMPAT

Kantor ESP-Cianjur

2.3. AGENDA KEGIATAN

1. Identifikasi Kegiatan Community Forestry di Cianjur
2. Tanya Jawab dan Analisa Kegiatan yang telah dilakukan
3. Rencana Tindak Lanjut.

2.4. PESERTA DISKUSI

No	Nama	Lembaga
1	Tonny	TNGP
2	Andi Taufiq	GP Ansor
3	Yuniarso	Perhutani
4	A Budhi Ningrat	PT. Bintang delapan
5	Jejen	Rimbawan Mandiri
6	Budiman	Rimbawan
7	Juanda	Dinas Pertanian
8	Dadang H	Dinas Pertanian
9	Dede Suryana	ESP-Cianjur
10	Erwinskyah	ESP-Jakarta
11	Idham Arsyad	ESP-Jakarta
12	Arman	ESP-Cianjur
13	Nia	ESP-Cianjur

2.5. HASIL DISKUSI

2.5.1. IDENTIFIKASI CF DI KABUPATEN CIANJUR

	GERHAN	GRLK	PHBM
STATUS LAHAN	Lahan Milik	Lahan milik	Perhutani
KONDISI LAHAN	Lahan Kritis	Lahan Kritis	Ex-Tebangan
SUMBER BIBIT	Pengusaha	Pengusaha	Sendiri
JAMINAN HUKUM	-	-	SKB
KELEMBAGAAN	KTH	KTH	LMDH
TEKNIS / POLA TANAM	Tumpang Sari	Tumpang Sari	Tumpang Sari
LAMA KEGIATAN	1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun
MASALAH			
SARAN / SOLUSI			

2.5.2. TANYA JAWAB

1. Sistem zonasi dalam pemanfaatan lahan ditaman nasional TNGP belum direncanakan dalam kebijakan
2. Harus ada model yang dikembangkan dalam implementasi hutan kemasyarakatan dikabupaten cianjur.
3. Pengadaan bibit harus susuai dengan kondisi lahan, keinginan masyarakat dan tepat waktu.
4. Keterlibatan masyarakat dengan sepenuhnya dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan monitoring.
5. Masyarakat dapat dilibatkan dalam program peremajaan hutan dalam posisi sebagai pekerja.
6. Harus ada penyamaan persepsi tentang makna partisipatif.
7. Harus mendengarkan aspirasi masyarakat dengan terjun kelapangan
8. Ditentukan lahan yang akan dijadikan model
9. Penyerahan wilayah secara dejre suda tapi secara defakto masih dalam persiapan dan penyelesaian administrasi

2.5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Pertemuan lanjutan akan di adakan di Agropolitan
2. Observasi lapangan di areal yang direncanakan

3. RENCANA PROGRAM REHABILITASI PARTISIPATIF II

3.1. WAKTU

15 Nopember 2005

3.2. TEMPAT

Wisma Agropolitan – Cipanas

3.3. AGENDA DISKUSI

1. Review
2. Persepsi tentang partisipatif
3. Orientasi lapangan
4. Refleksi
5. Rencana tindak lanjut

3.4. PESERTA DISKUSI

No	Nama	Lembaga
1	Idham	ESP-Jakarta
2	Nia	ESP-Cianjur
3	Lutfi	Sinurat Layung
4	Usaf	Ginapala
5	Abdul Aziz	Perhutani
6	Andi	GP-Ansor
7	Erwinskyah	ESP-Jakarta
8	Didin	TNGP
9	Arman	ESP-Cianjur
10	Dede	ESP-Cianjur
11	Dadang	Dinas Pertanian
12	Wana	Dinas Pertanian
13	Mulyadi	Agropolitan

No	Nama	Lembaga
14	Dani	Leppel
15	Ade Teguh	FK2M
16	Yuniarso	Perhutani
17	Budi	PDAM
18	Iwan	PSDAP
19	Dodo	Dinas Pertanian
20	B. Bunyamin	Agropolitan

3.5. HASIL DISKUSI

3.5.1. REVIEW

1. Rehabilitasi lahan seluas 50 Ha, areal ex-perhutani sebagai perluasan TNGP (belum definitive)
2. Rehabilitasi harus dilakukan secara partisipatif, yang persepsinya masih berbeda antara pelibatan masyarakat secara utuh dari mulai penyusunan rencana samapai evaluasi, atau atau pelibatan masyarakat dengan cara dibayar (buruh) dalam seluruh komponen kegiatan dan pengdaan.
3. Harus ada orientasi lapangan dalam bentuk yang paling sederhana (observasi) untuk memahami kondisi lapangan dan harapan masyarakat terutama masyarakat petani dengan lahan Negara.
4. Mengali inisiatif local dalam mengembangkan model kehutanan kemasyarakatan sebagai bahan acuan dalam model CF.
5. Pertegas perlakuan terhadap masyarakat terkait dengan pemanfaatan lahan, difasilitasi dan dibina dalam pemanfaatan lahan atau secara bertahap dikeluarkan dengan mempersiapkan usaha alternatif diluar kawasan.
6. Sistem zonasi harus diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat, tetapi sistem zonasipun harus disosialisasukan dan diterapkan ditingkat desa.

3.5.2. PERSEPSI REHABILITASI PARTISIPATIF.

1. Diskusi dengan masyarakat untuk mengetahui kondisi masyarakat, keinginan masyarakat, potensi dan harapan masyarakat.
2. Koordinasi dengan mitra dan calon mitra yang akan dilibatkan dalam kegiatan.
3. Peran serta masyarakat dalam menyusun perencanaan rehabilitasi
4. Rehabilitasi harus berorientasi pada sistem dengan komoditi yang sesuai dengan situasi dan kondisi.
5. Membuat kelembagaan masyarakat local sebagai alat koordinasi dalam program.
6. Dibangun aturan main didalam lingkungan lembaga local dan aturan main dengan lembaga luar.
7. Membangun kepercayaan dari masyarakat
8. Ada jaminan hukum yang menaungi kegiatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan.
9. Rencana rehabilitasi yang akan dilakukan harus berorientasi pada kepentingan ekonomi masyarakat setempat.

10. Nilai-nilai ekonomi masyarakat dikembangkan melalui kegiatan yang berbasis lahan maupun non lahan.
11. Harus didorong political will pemerintah kabupaten Cianjur dalam dalam penggunaan hasil hutan non katu (jasa lingkungan) untuk kepentingan konservasi daerah tangkapan air (hulu)

3.5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Pengumpulan data yang terkait dengan kawasan yang meliputi :
 - a. Kepastian wilayah 50 Ha yang akan dijadikan model rehabilitasi partisipatif.
 - b. Data penggrap yang telah melakukan aktifitas pemanfaatan lahan.
2. Luas kepemilikan lahan
3. Menyusun rencana kajian wilayah yang akan dijadikan model CF
4. Penyiapan team dan bahan survey
5. Team yang akan mengkoordinir kegiatan tersebut adalah :
 - a. TNGP (coordinator)
 - b. Perhutani
 - c. FK2M
 - d. Mitra TNGP
 - e. ESP
 - f. Bappeda
 - g. Dinas PKT

ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM

**Ratu Plaza Building, 17th. Fl.
Jl. Jend. Sudirman No. 9
Jakarta 10270
Indonesia**

**Tel. +62-21-720-9594
Fax. +62-21-720-4546**

www.esp.or.id